

## **WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN PENCEGAHAN FRAUD: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR**

**Benny Marciano<sup>1\*</sup>, Ardiansyah Syam<sup>1</sup>, Suyanto<sup>1,2</sup>, Nurmala Ahmar<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta

*marcianobenno@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine previous research literature on the effect of the whistleblowing system as a collaborative system on fraud prevention in a company or organization. This study uses a review of various literature on fraud prevention available in various databases. The results of this study indicate that the Whistleblowing System (WBS) is a form of illegal act reporting and supervision of an organization or company. There are 4 (four) important elements in the WBS, namely anonymity, independence, accessibility and follow-up. WBS is an effective mechanism in preventing fraud and in its implementation requires the company's commitment to protecting the whistleblower's personal data, a clear and responsible reporting mechanism and the process of evaluating and improving the system. Therefore, to support fraud prevention, companies are advised to implement an effective Whistleblowing system.*

**Keywords:** *Fraud; Prevention; Whistleblowing system*

### **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk mengkaji literatur penelitian terdahulu tentang pengaruh *whistleblowing system* sebagai sistem kolaboratif terhadap pencegahan *fraud* dalam suatu perusahaan atau organisasi. Studi ini menggunakan tinjauan berbagai literatur tentang pencegahan *fraud* yang tersedia pada berbagai *database*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *whistleblowing system* merupakan suatu bentuk pelaporan dan pengawasan organisasi atau perusahaan. Terdapat 4 (empat) elemen penting dalam WBS yaitu *anonymity*, *independence*, *accessibility* dan *follow up*. WBS merupakan mekanisme efektif dalam pencegahan *fraud* dan dalam implementasinya memerlukan komitmen perusahaan dalam perlindungan data diri pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggung jawab serta proses evaluasi dan perbaikan sistem. Oleh karena itu, untuk mendukung pencegahan *fraud*, perusahaan disarankan dapat menerapkan *whistleblowing system* dengan efektif.

**Kata Kunci:** *Fraud; Pencegahan; Whistleblowing system*

## 1. PENDAHULUAN

*Fraud* merupakan sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja (Husnawati & Handajani, 2017). Dengan mengetahui berbagai faktor yang dapat mencegah terjadinya *fraud*, maka perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi resiko kehilangan di masa yang akan datang akibat tindakan *fraud* tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan memahami secara benar karakter bisnis, lingkungan dan personil yang dimiliki oleh suatu industri.

Sejumlah elemen dasar yang menyebabkan terjadinya *fraud* telah dijelaskan pada beberapa studi sebelumnya (Aghghaleh et al., 2014; Holtfreter, 2008; Huang et al., 2016; Putri & Irwandi, 2016; Sudarmanto, 2020). Teori pentagon *fraud* menjelaskan bahwa elemen yang berpengaruh terhadap terjadinya *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*) (Mulya et al., 2019; Sawaka & Ramantha, 2020; Triyanto, 2019). Teori ini dipaparkan oleh Crowe tahun 2011 yang lebih dikenal dengan *Crowe's Fraud Pentagon Theory*.

*Fraud* telah menjadi ancaman nyata terhadap organisasi dalam skala kecil maupun besar di dalam seluruh jenis industri. Survei *Fraud* Indonesia (SFI) dilakukan ACFE tahun 2019 yang mendasar pada *Report to The Nation* (RTTN) menunjukkan bahwa *fraud* yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian terbesar di Indonesia adalah tindak pidana korupsi (ACFE Indonesia Chapter, 2020). Dalam survei tersebut diketahui bahwa *fraud* dalam bentuk korupsi merupakan *fraud* yang memiliki dampak kerugian terbesar (ACFE Indonesia Chapter, 2020).

Survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2019 menunjukkan bahwa metode *whistleblowing system* (WBS) merupakan sarana pencegahan *fraud* yang banyak dinilai sangat efektif sebagai *anti-fraud control* dengan persentase sebesar 22,6% (ACFE Indonesia Chapter, 2020). WBS adalah sistem yang mengelola pelaporan mengenai seluruh tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, peraturan dan etika yang dilaporkan secara rahasia, anonim dan mandiri. Sistem ini digunakan untuk mengoptimalkan peran serta seluruh *stakeholder* perusahaan dalam mengungkapkan tindakan pelanggaran yang terjadi. WBS merupakan suatu sistem kolaboratif yang baik untuk meningkatkan efektifitas kontrol terhadap perusahaan.

Perkembangan perusahaan dengan masalah yang semakin kompleks akan mengakibatkan kesulitan dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan sehingga berpotensi untuk terjadinya *fraud*. Kejadian *fraud* dalam perusahaan menunjukkan adanya masalah pada tugas dan fungsi perusahaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan regulasi yang ada yang dapat berdampak pada tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, tindakan pencegahan *fraud* sangat perlu dilakukan salah satunya melalui *whistleblowing system*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *whistleblowing system* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *fraud*. Berbagai studi menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap

pencegahan *fraud* (Agusyani et al., 2016; Gaurina et al., 2017; Islamiyah et al., 2020; Jayanti & Suardana, 2019; Maulida & Bayunitri, 2021; Puryati & Febriani, 2020; Sari et al., 2021; Sujana et al., 2020; Wahyuni & Nova, 2018; Wardana et al., 2017). Dengan implementasi *whistleblowing system* yang baik pada suatu organisasi, maka integritas dan keterbukaan akan terbentuk sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*. Akan tetapi, pada penelitian lain menunjukkan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* karena belum adanya perlindungan data dan identitas pelapor sehingga mempengaruhi karyawan dalam melaporkan tindakan *fraud* (Sujana et al., 2020).

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Publikasi terkait *whistleblowing system* dan pencegahan *fraud* dengan studi kasus di Indonesia sangat terbatas. Oleh karena itu, studi ini akan membahas lebih dalam korelasi kedua variabel dengan berbagai contoh kasus berdasarkan publikasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada berbagai organisasi bahwa *whistleblowing system* dapat menjadi sarana pencegahan *fraud* yang efektif, sehingga mampu mencegah terjadinya kerugian di masa yang akan datang.

## 2. TELAAH TEORI

*Agency Theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Dalam *agency theory* tersebut, manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh *principal* untuk bekerja demi kepentingan *principal*. *Agency theory* mempunyai fokus yaitu penentuan kontrak yang paling efisien yang akan menjadi dasar hubungan antara *agent* dan *principal*.

*Principal* menilai kinerja *agen* berdasarkan kemampuannya untuk dapat menghasilkan keuntungan atau laba yang besar yang akan berpengaruh secara langsung pada dividen yang diterima oleh *principal*. Keuntungan ini merupakan harapan *principal* untuk mendapatkan *return* yang tinggi atas investasi yang ditanamkan pada perusahaan. Penilaian kinerja *agent* berdasarkan laba yang dihasilkan, maka *agent* akan mungkin terjadi *conflict of interest* bagi manajemen untuk terlibat dalam *fraud/manipulasi* dengan tujuan untuk memaksimalkan kompensasi yang diterima (Omar et al., 2014).

Manajemen yang diberi kuasa untuk mengelola keuangan perusahaan mempunyai kepentingan pribadi untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya dengan melakukan *fraud*. Metode yang paling sering digunakan untuk melakukan *fraud* atau manipulasi adalah dengan kecurangan pada pencatatan pendapatan fiktif, menyembunyikan informasi terkait kewajiban atau pengeluaran, dan menggelembungkan aset yang dilaporkan (Omar et al., 2014). Tindakan *fraud* pada laporan keuangan (*financial statement fraud*) yang dilakukan *agent* jika dibiarkan dan tidak diketahui oleh prinsipal, dapat berakibat buruk secara material pada keuangan perusahaan.

Dengan pendekatan ekonomi menggunakan *agency theory*, terjadinya *fraud* menentukan motivasi ekstrinsik untuk meminimalkan individu tidak terlibat dalam perilaku manipulasi (Shi et al., 2017). *Principal* berupaya untuk meningkatkan kewaspadaan pada manajemen sehingga manajemen berupaya mencegah terjadinya *fraud* pada laporan keuangan. Dengan memasukkan unsur evaluasi oleh *principal* melalui *corporate control* maka potensi terjadinya *fraud* dapat diminimalkan (Shi et al., 2017).

Teori sinyal dikembangkan pertama kali oleh Spence (1973) untuk menjelaskan perilaku di pasar tenaga kerja. Teori ini menjelaskan perilaku dua pihak ketika mereka mengakses informasi yang berbeda. Teori sinyal menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal untuk mempengaruhi perilaku penerima sinyal (Ghozali, 2020). Informasi yang diperoleh individual maupun perusahaan sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan pribadi, bisnis maupun dalam lingkungan pemerintahan.

Donal R Cressey (1953) mengembangkan model bahwa pengaruh dimensi *fraud triangle* dengan menunjukkan dalam beberapa situasi yang menyebabkan penilaian risiko yang lebih baik (Huang et al., 2016). *Fraud* dapat dihasilkan dari kombinasi tiga faktor penyebab yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Selanjutnya *fraud triangle* berkembang menjadi *fraud diamond*. *Fraud diamond* merupakan pandangan yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). *Fraud diamond* adalah pengembangan model *fraud triangle* dengan menambahkan satu faktor pendorong *fraud* yaitu *capability* (Wolfe & Hermanson, 2004). Dalam *fraud diamond*, terdapat enam *capability* dalam melakukan *fraud* yaitu posisi, intelegensia/*smart*, ego dan keyakinan yang kuat, pemaksaan (*coercion*), berbohong dengan efektif dan konsisten, serta stres (Wolfe & Hermanson, 2004).

*Fraud diamond* berkembang menjadi *fraud pentagon*. Teori *Fraud Pentagon* dicetuskan oleh Crowe Horwath pada tahun 2011 yang merupakan pengembangan dari model *fraud triangle model* (Cressey, 1953). Unsur-unsur dalam *fraud pentagon* terdiri dari *arrogance*, *competence* atau *capability*, *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* (Horwath, 2011). Setidaknya 70% *fraud* dilakukan oleh pelaku dengan mengombinasikan tekanan dengan arogansi dan keserakahan. *Arrogance* merupakan sikap superioritas dan keserakahan yang perlu diarahkan dan diperbaiki. Sifat ini dapat memicu terjadinya *fraud* karena individu yakin bahwa dirinya tidak akan diketahui apabila melakukan *fraud* dan yakin jika ada sanksi maka dirinya tidak akan mendapatkan sanksi (Aprilia, 2017).

*Fraud* merupakan tindakan kebohongan yang disengaja yang dapat berupa penggelapan aset, penggelapan informasi, penyembunyian fakta, atau korupsi (Wardana et al., 2017). Jenis-jenis *fraud* antara lain korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan (ACFE Indonesia Chapter, 2016, 2020). Dalam mengembangkan strategi pencegahan *fraud* yang efektif, organisasi harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal, 2) kompleksitas kegiatan usaha, 3) potensi, jenis dan risiko terjadinya *fraud*, 4) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan (Sofia, 2016).

*Whistleblowing* merupakan usaha untuk mengungkapkan atau melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan atau tindakan yang melawan hukum yang

terjadi di perusahaan/organisasi tempat karyawan bekerja (Nugroho, 2015). *Whistleblowing* bisa terjadi karena adanya konflik antara loyalitas pegawai dan perlindungan kepentingan publik (Wardana et al., 2017). *Whistleblower* adalah seseorang yang mengungkapkan/melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan dari organisasi tempat karyawan bekerja (Nugroho, 2015). *Whistleblowing system* bukan hanya menjadi sarana pelaporan, tetapi juga menjadi bentuk pengawasan organisasi (Jayanti & Suardana, 2019). Terdapat 4 (empat) elemen yang menjadikan *whistleblowing system* efektif yaitu: *anonymity*, *independence*, *accessibility* dan *follow up* (Albrecht et al., 2012).

### 3. METODE PENELITIAN

Studi ini adalah studi tinjauan literatur yang dilakukan dengan tahapan: (1) menentukan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian dengan menggunakan metode PICO (*Problem, Intervention, Comparison, Outcome*), (2) melakukan pencarian artikel/publikasi berdasarkan pada kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah ditentukan, (3) melakukan analisis dan sintesis dari artikel yang sudah dikumpulkan. Tinjauan literatur ini berdasarkan berbagai studi yang sudah dipublikasikan yang akan dievaluasi menggunakan strategi pencarian elektronik dari database yang berbeda di Web of Science, Scopus, dan pencarian manual di Google Cendekia.

Pencarian pada berbagai database menggunakan beberapa kata kunci seperti “*fraud*”, “pencegahan”, “kecurangan”, “korupsi”, “*Whistleblowing*”, “*Whistleblowing system*”, dan “sistem pelaporan pelanggaran”. Artikel dimasukkan dalam penelitian ini jika memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut: (1) dilaporkan sebagai publikasi atau laporan dan ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, (2) penelitian sebelumnya merupakan penelitian kualitatif atau kuantitatif atau tinjauan pustaka, (3) fokus pada proses dan faktor yang terkait dengan pencegahan *fraud*, dan (4) tanggal publikasi 10 tahun terakhir dari 2012 hingga 2021. Studi tidak termasuk artikel pra-cetak, opini dan komentar. Pada tahap selanjutnya, Penulis menganalisis artikel lengkap dari setiap judul artikel. Penulis mencoba mencari artikel teks lengkap melalui berbagai database. Namun, jika teks lengkap tidak dapat ditemukan, penulis mencoba mengirimkan permintaan artikel lengkap ke email penulis korespondensi secara langsung. Hanya studi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dan menemukan teks lengkap yang akan diekstraksi dan dimasukkan dalam studi.

Sepuluh artikel dipilih setelah melakukan *screening* dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis data dilakukan dengan analisis konten menggunakan tabel matriks. Matriks digunakan untuk membandingkan subyek penelitian, tempat/lokasi dilakuka studi, *outcome* yang digunakan, serta hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara *whistleblowing system* dan *fraud*.

#### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Sepuluh artikel dianalisis dengan menggunakan matriks yang disajikan pada tabel 1 yang menyajikan variabel yang diteliti dalam setiap artikel. Semua artikel menggunakan desain studi potong lintang atau *cross sectional* dan menggunakan metode regresi berganda dalam menganalisis data. Dari 10 artikel yang dianalisis, terdapat lima studi yang dilakukan di Provinsi Bali, dua studi yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat, satu studi masing-masing dilakukan di Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Riau.

Hasil analisis konten dalam studi ini menunjukkan bahwa dari 10 artikel, terdapat sembilan artikel yang menunjukkan pengaruh positif *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan hanya ada satu artikel yang menunjukkan penerapan *whistleblowing system* tidak berpengaruh pada pencegahan *fraud*.

*Fraud* merupakan tindakan kebohongan yang disengaja yang dapat berupa penggelapan aset, penggelapan informasi, menyembunyikan fakta, atau korupsi (Wardana et al., 2017). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyebutkan pencegahan *fraud* merupakan bentuk upaya yang terintegrasi yang dapat menekan terjadinya penyebab *fraud* (*fraud triangle*) (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2008). Pada penelitian lainnya, pencegahan *fraud* didefinisikan sebagai suatu upaya untuk menghilangkan atau mengeliminir hal-hal yang menyebabkan timbulnya kecurangan (Amrizal, 2004). Pencegahan *fraud* juga disebutkan sebagai suatu sistem dan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, namun bukan satu-satunya tujuan untuk mencegah dan menghalangi (dapat membuat jera) terhadap terjadinya *fraud* (Iqbal, 2010). Pencegahan *fraud* merupakan upaya atau usaha menolak atau menahan segala bentuk *fraud* yang dilakukan pegawai yang akan berdampak pada kerugian perusahaan/organisasi (Nugroho, 2015).

Pencegahan *fraud* merupakan upaya penting yang dilakukan dengan tujuan mencegah *fraud* pada semua lini organisasi (*prevention*), menangkal pelaku potensial atau tindakan yang bersifat coba-coba (*deference*), mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin (*disruption*), mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian (*identification*) serta untuk melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan/kecurangan yang dilakukan oleh pelaku (*civil action prosecution*) (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2008). *Occupational fraud* dapat terjadi dalam bentuk korupsi (konflik kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan), penyalahgunaan aset perusahaan (*lapping, kitting, dan skimming*), serta kecurangan laporan keuangan (misalnya dalam bentuk salah saji material laporan keuangan (Nugroho, 2015).

Dalam mengembangkan strategi pencegahan *fraud* yang efektif, organisasi harus memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal, 2) kompleksitas kegiatan usaha, 3) potensi, jenis dan risiko terjadinya *fraud*, 4) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan (Sofia, 2016). Dari beberapa studi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya, sistem dan prosedur yang terintegrasi yang dapat menekan terjadinya *fraud*, menghilangkan sebab-sebab atau faktor timbulnya *fraud* dan menghindari

terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh pegawai dan dapat berpotensi pada timbulnya kerugian perusahaan.

Studi terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara *whistleblowing system* dan pencegahan *fraud* seperti yang disajikan pada Tabel 1 (Agusyani et al., 2016; Gaurina et al., 2017; Islamiyah et al., 2020; Jayanti & Suardana, 2019; Maulida & Bayunitri, 2021; Puryati & Febriani, 2020; Sari et al., 2021; Sujana et al., 2020; Wahyuni & Nova, 2018; Wardana et al., 2017). *Whistleblowing* merupakan usaha untuk mengungkapkan atau melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan atau tindakan yang melawan hukum yang terjadi di perusahaan/organisasi tempat karyawan bekerja (Nugroho, 2015). *Whistleblowing* bisa terjadi karena adanya konflik antara loyalitas pegawai dan perlindungan kepentingan publik (Wardana et al., 2017). *Whistleblower* adalah seseorang yang mengungkapkan/melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan dari organisasi tempat karyawan bekerja (Nugroho, 2015). *Whistleblowing System (WBS)* merupakan sistem yang dirancang terkait kriteria kecurangan yang dilaporkan yang meliputi 5W+1H, tindak lanjut dari laporan, penghargaan dan perlindungan bagi pelapor, hukuman/sanksi bagi terlapor (Nugroho, 2015). *Whistleblowing System* bukan hanya menjadi sarana pelaporan, tetapi juga menjadi bentuk pengawasan organisasi (Jayanti & Suardana, 2019).

Tabel 1. Tinjauan literatur tentang pencegahan *Fraud* dan *Whistleblowing System*

| No. | Penulis                              | Lokasi dan responden            | Hasil   |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| 1   | Wahyuni & Nova (2018)                | Bengkalis (33 responden)        | <i>Whistleblowing system</i> dan kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Komitmen organisasi terkait kebijakan perlindungan data diri pelapor, mekanisme pelaporan yang sangat jelas dan bertanggung jawab serta adanya evaluasi dan <i>follow up</i> sangat berpengaruh dalam efektivitas penerapan <i>whistleblowing system</i> dalam pencegahan <i>fraud</i> .  |
| 2   | Wardana, Sujana & Wahyuni (2017)     | Buleleng (69 responden)         | <i>Whistleblowing system</i> muncul ketika ada konflik antara loyalitas dan perlindungan kepentingan publik. Pengendalian internal, <i>whistleblowing system</i> , dan moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .   |
| 3   | Gaurina, Purnamawati, Atmadja (2017) | Bali Hai Cruises (72 responden) | Persepsi karyawan terkait etis dan <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .  |
| 4   | Islamiyah, Made, Sari (2020)         | Malang (99 responden)           | Kompetensi Sumber Daya Manusia, moralitas, sistem pengendalian internal dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> . Pelaporan melalui <i>whistleblowing system</i> sangat efektif dalam meminimalkan atau menghilangkan <i>fraud</i> yang dilakukan oleh pihak internal dalam organisasi.   |
| 5   | Maulida, Bayunitri (2021)            | Bandung (30 responden)          | <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> sebesar 54,3%. <i>Whistleblowing system</i> merupakan media penting dalam pencegahan <i>fraud</i> . <i>Whistleblowing system</i> yang efektif akan mendorong pegawai dan masyarakat untuk lebih berani dalam melaporkan tindakan <i>fraud</i> . <i>Whistleblowing system</i> juga dapat merubah budaya “diam” menjadi budaya “jujur dan terbuka”. Hasil studi menunjukkan bahwa <i>fraud</i> lebih banyak |

| No. | Penulis                          | Lokasi dan responden              | Hasil   |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---|
|     |                                  |                                   | dideteksi melalui pelaporan atau informasi dari sesama pegawai daripada informasi dari temuan Auditor.  |
| 6   | Jayanti, Suardana (2019)         | Kota Denpasar (108 responden)     | Kompetensi Sumber Daya Manusia, moralitas yang baik, penerapan <i>whistleblowing system</i> , dan sistem pengendalian internal yang kuat berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .   |
| 7   | Sari, Nurwanah (2021)            | Kota Makassar (31 responden)      | Pengendalian internal, penerapan <i>whistleblowing system</i> dan informasi yang asimetri berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> . <i>Whistleblowing system</i> berjalan efektif karena adanya dukungan organisasi.   |
| 8   | Sujana, Suardikha, Laksmi (2020) | Kota Denpasar (97 responden)      | Kompetensi Sumber Daya Manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> , tetapi penerapan <i>whistleblowing system</i> tidak berpengaruh pada pencegahan <i>fraud</i> . Hal ini mungkin terjadi karena belum adanya <i>whistleblowing system</i> yang memadai untuk perlindungan pelapor terkait dengan tindakan <i>fraud</i> , sehingga mempengaruhi keamanan pelapor serta kekhawatiran pelapor untuk berurusan dengan hukum dalam melaporkan indikasi <i>fraud</i> . |
| 9   | Puryati, Febriani (2020)         | Bandung (62 responden)            | Pencegahan <i>fraud</i> dapat dilakukan dengan membangun pengendalian internal yang handal dan meningkatkan <i>whistleblowing system</i> pada semua pihak dalam organisasi.   |
| 10  | Agusyani, Sujana, Wahyuni (2016) | Kabupaten Buleleng (90 responden) | Penerapan <i>whistleblowing system</i> dan kompetensi Sumber Daya Manusia pada suatu organisasi berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>  |

Terdapat 4 (empat) elemen yang menjadikan *whistleblowing system* efektif yaitu: *anonymity* (karyawan yakin bahwa mereka bisa melaporkan tindakan kecurangan/pelanggaran tanpa adanya ketakutan ada tindakan pembalasan, sehingga identitas pelapor harus disembunyikan), *independence* (karyawan lebih nyaman untuk melaporkan pada pihak independen atau pihak yang tidak terkait dengan organisasi atau pihak yang terlibat dalam pelanggaran), *accessibility* (karyawan memiliki akses yang mudah untuk melaporkan pelanggaran melalui beberapa saluran yang berbeda, misalnya melalui telepon, email, online atau surat) dan *follow up* (pelaporan pelanggaran harus ditindaklanjuti dan tindakan solutif harus diambil, sehingga *whistleblower* akan bisa lebih lanjut melaporkan karena manfaat sistem yang baik (Albrecht et al., 2012). Kegagalan *whistleblowing system* yang diimplementasikan di perusahaan bisa gagal dalam mendeteksi *fraud* karena (1) kurangnya anonimitas yang menyebabkan timbulnya ketakutan akan pembalasan pada karyawan yang melaporkan pelanggaran, (2) budaya kerja organisasi yang tidak kondusif, (3) kebijakan organisasi terkait perilaku dan etika pada karyawan yang melaporkan pelanggaran, serta (4) kurangnya kesadaran karyawan yang disebabkan sosialisasi/komunikasi *whistleblowing system* yang kurang efektif (Albrecht et al., 2012).

*Whistleblowing system* merupakan salah satu mekanisme efektif dalam pencegahan *fraud* yang sangat memerlukan komitmen perusahaan dalam



perlindungan data diri pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggung jawab serta proses evaluasi dan perbaikan sistem (Wahyuni & Nova, 2018; Wardana et al., 2017). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* yaitu dengan semakin tingginya *whistleblowing system*, maka pencegahan *fraud* juga akan semakin baik (Agusyani et al., 2016; Gaurina et al., 2017; Islamiyah et al., 2020; Jayanti & Suardana, 2019; Maulida & Bayunitri, 2021; Wahyuni & Nova, 2018; Wardana et al., 2017). *Whistleblowing system* juga mampu menumbuhkan budaya kerja yang mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam meminimalisir kecurangan yang terjadi pada perusahaan (Wahyuni & Nova, 2018). Karyawan yang mampu memahami tiga aspek *whistleblowing system* (aspek struktural, operasional dan perawatan/*maintenance*) akan berpengaruh pada keengganan karyawan dalam melaporkan tindakan *fraud* jika mereka mengetahuinya (Agusyani et al., 2016).

Sebuah penelitian menunjukkan hasil yang berbeda bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* (Sujana et al., 2020). Hal ini diduga terjadi karena *whistleblowing system* belum diimplementasikan dengan baik sehingga belum ada perlindungan terhadap pelapor dalam melaporkan tindak penipuan atau korupsi serta adanya kekhawatiran masyarakat untuk berurusan dengan hukum terkait dengan pelaporan *fraud* (Sujana et al., 2020).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi *literatur review* ini menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. *Whistleblowing System* merupakan mekanisme efektif dalam pencegahan *fraud* yang sangat memerlukan komitmen perusahaan dalam perlindungan data diri pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggung jawab serta proses evaluasi dan perbaikan sistem.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: (1) lokasi penelitian berdasarkan artikel sebelumnya hanya terbatas dengan studi kasus di Indonesia, dan (2) fokus bidang usaha pada literatur review ini tidak spesifik. Oleh karena itu, untuk mendukung pencegahan *fraud*, perusahaan disarankan dapat menerapkan *whistleblowing system* dengan efektif. Penelitian *systematic review* lanjutan mengenai hubungan *whistleblowing system* dan *fraud* yang fokus pada bidang usaha yang sama, misalnya pada bidang perbankan, bidang perkebunan, bidang kesehatan dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia Chapter. (2016). *Survai Fraud Indonesia 2016*.
- ACFE Indonesia Chapter. (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*. In *ACFE Indonesia Chapter*.
- Aghghaleh, S. F., Iskandar, T. M., & Mohamed, Z. M. (2014). *Fraud Risk Factors of Fraud Triangle and the Likelihood of Fraud Occurrence: Evidence from*

- Malaysia. *Information Management and Business Review*, 6(1), 1–7.  
<https://doi.org/10.22610/imbr.v6i1.1095>
- Agusyani, N. K. S., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2016). Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program SI*, 6(3).
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination* (Fourth Edi). Soth-Western Cengage Learning.
- Amrizal. (2004). *Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan*.
- Aprilia. (2017). Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan Yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 101–132.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2008). *Fraud Auditing*. Pusdiklatwas BPKB.
- Gaurina, N. P. M., Purnamawati, G. A., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh persepsi karyawan mengenai perilaku etis dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud ( Studi Kasus Pada Bali Hai Cruises ). *Jurusan Akuntansi Program SI*, 8(2).
- Holtfreter, K. (2008). Determinants of Fraud Losses in Nonprofit Organizations. *Nonprofit Management and Leadership*, 19(1). <https://doi.org/10.1002/nml>
- Horwath, C. (2011). *Why the Fraud Triangle Is No Longer Enough*.
- Huang, S. Y., Lin, C. C., Chiu, A. A., & Yen, D. C. (2016). Fraud detection using fraud triangle risk factors. *Information Systems Frontiers*, 19(6). <https://doi.org/10.1007/s10796-016-9647-9>
- Husnawati, N., & Handajani, L. (2017). Accounting Fraud: Determinant, Moderation of Internal Control System And The Implication To Financial Accountability. *E-Proceeding International Conference and Call for Papers*, 311–335.
- Iqbal, M. (2010). *Pengaruh tindakan pencegahan, pendeteksian dan audit investigatif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan dalam laporan keuangan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak (Studi empiris pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Patok). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam

- Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117–1131.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Maulida, W. Y., & Bayunitri, B. I. (2021). The influence of whistleblowing system toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(4), 275–294. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Mulya, A., Rahmatika, D. N., & Kartikasari, M. D. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon (Pressure, Opportunity, Rationalization, Competence, dan Arrogance) terhadap Pendeteksian Fraudulent Financial Statement pada Perusahaan Property, Real Estate, and Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun . *Jurnal Perpajakan Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1), 11–25.
- Nugroho, V. O. (2015). *Pengaruh persepsi karyawan mengenai whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dengan perilaku etis sebagai variabel intervening pada PT Pagilaran*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Omar, N., Rahman, R. A., Danbatta, B. L., & Sulaiman, S. (2014). Management Disclosure and Earnings Management Practices in Reducing the Implication Risk. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 88–96. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.014>
- Puryati, D., & Febriani, S. (2020). The Consequence of Whistleblowing System and Internal Control toward Fraud Prevention: A Study on Indonesian State Owned Enterprise. *International Journal of Business and Technology Management*, 2(3), 35–48.
- Putri, P. A. A., & Irwandi, S. A. (2016). The determinants of accounting fraud tendency. *The Indonesian Accounting Review*, 6(1). <https://doi.org/10.14414/tiar.v6i1.857>
- Sari, R., Su'un, M., & Nurwanah, A. (2021). Effect of internal control , whistleblowing role and data asymmetry against fraud prevention. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2(1), 92–99.
- Sawaka, I. G. N. H., & Ramantha, I. W. (2020). Fraud pentagon theory in detecting financial perception of financial reporting with good corporate governance as moderator variable. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 7(1), 84–94. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n1.824>
- Shi, W., Connelly, B. L., & Hoskisson, R. E. (2017). External Corporate Governance and Financial Fraud: Cognitive Evaluation Theori Insight on Agency Theory Prescriptions. *Strategic Management Journal*, 38, 1268–1286. <https://doi.org/10.1002/smj>
- Sofia, I. P. (2016). The Impact of Internal Control and Good Corporate Governance on Fraud Prevention. *2nd International Seminar on Accounting Society, January*, 251–257.

- Sudarmanto, E. (2020). Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107–121. <https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2506>
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p06>
- Triyanto, D. N. (2019). Fraudulence Financial Statements Analysis using Pentagon Fraud Approach. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(2), 26. <https://doi.org/10.24198/jaab.v2i2.22641>
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2018). Analisis whistleblowing system dan kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud (Studi empiris pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Inovasi Dan Bisnis*, 6, 189–194.
- Wardana, I. G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Program S1*, 8(2), 1–10.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.